



## Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan BLT Kesra terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Sumbawa

Rabiatul Adawiyah<sup>1</sup>, Arya Zulfikar Akbar<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

\*Corresponding Author's e-mail: [arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id](mailto:arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id)

### Article History:

Received: March 14, 2026

Revised: March 27, 2026

Accepted: March 30, 2026

### Keywords:

Social Assistance; Household Budget Resilience; Family Hope Program; SEM-PLS; Public Sector Accounting.

**Abstract:** Poverty alleviation at the regional level remains a structural challenge necessitating comprehensive social protection. This study investigates the impact of the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (Sembako), and the localized Direct Cash Assistance (BLT Kesra) on the household budget resilience of impoverished communities in Sumbawa District. Employing a quantitative descriptive-associative design, primary data were collected through purposive sampling from 96 active beneficiary families. The empirical data were rigorously analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). The structural model evaluation reveals a coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.491, indicating that the simultaneous integration of these three social assistance programs explains 49.1% of the variance in household budget resilience. Partially, all three variables exhibit a positive and statistically significant effect. PKH emerges as the most dominant determinant, functioning as the primary liquidity anchor for mandatory expenses. Furthermore, Sembako ensures food inventory resilience, while BLT Kesra provides crucial quick cash for short-term solvency. Viewed through a public sector accounting lens, the synchronized distribution of these conditional and unconditional transfers, supported by transparent digital systems like SIKS-NG, acts as a critical buffer against economic shocks and prevents the liquidation of essential domestic assets. Conclusively, synergizing targeted social safety nets with enhanced financial literacy is imperative for sustainable household economic stability.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Adawiyah, R., & Akbar, A. Z. (2026). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan BLT Kesra terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Sumbawa. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(3), 2437–2456. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i3.6024>

## PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah tetap menjadi tantangan struktural yang memerlukan intervensi perlindungan sosial komprehensif dan tepat sasaran. Secara konseptual, pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan proses penghapusan berbagai "ketidakbebasan" yang membatasi akses masyarakat terhadap peluang hidup yang layak. Sejalan dengan pemikiran Amartya Sen dalam Pembangunan sebagai Kebebasan (2000), kemiskinan merupakan bentuk utama dari ketidakbebasan tersebut yang menghambat individu untuk menjalankan agensi mereka secara nalar. Pembangunan harus berfokus pada peningkatan kapabilitas individu untuk memilih kehidupan yang mereka hargai, di mana literasi keuangan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga agar tidak terus terjebak dalam

siklus kemiskinan (Pratama, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah telah mengadopsi berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk akses pendidikan dan kesehatan, Program Sembako guna menjamin kecukupan nutrisi keluarga, hingga Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebagai bantuan tunai tanpa syarat untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi. Sinergi antara berbagai bantuan ini, seperti PKH dan bantuan pangan, sangat krusial dalam menurunkan angka kemiskinan multidimensi secara efektif (Hidayat dan Setiawan, 2023). Integrasi program-program tersebut juga terbukti mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di tingkat mikro (Ramadhan, 2024).

Anggaran rumah tangga pada dasarnya merupakan sebuah instrumen manajerial mikro yang mencerminkan kapabilitas unit domestik dalam mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas guna memenuhi beragam kebutuhan hidup yang bersifat esensial. Secara konseptual, pengelolaan anggaran ini melibatkan proses identifikasi pendapatan dan pengendalian pengeluaran yang sistematis demi menjaga stabilitas ekonomi keluarga serta menghindari defisit fiskal. Efektivitas dalam manajemen anggaran domestik tidak hanya menentukan tingkat konsumsi harian, tetapi juga menjadi penentu resiliensi rumah tangga dalam menghadapi guncangan ekonomi eksternal maupun fluktuasi harga kebutuhan pokok (Nursini, 2020). Dengan demikian, pemahaman mengenai pola anggaran menjadi krusial untuk melihat sejauh mana intervensi bantuan pemerintah mampu memperkuat fondasi keuangan rumah tangga miskin dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Sumbawa, urgensi kebijakan ini semakin nyata jika meninjau dinamika data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Meskipun persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat menurun menjadi 11,79 persen dari tahun sebelumnya, namun terdapat anomali di mana Garis Kemiskinan justru meningkat sebesar 3,18 persen menjadi Rp492.991 per kapita per bulan. Peningkatan garis kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh tingginya volatilitas harga komoditas pangan spesifik di Sumbawa, seperti fluktuasi tajam pada harga beras, cabai, dan minyak goreng akibat disrupsi rantai pasok lokal. Dalam kondisi inflasi harga pangan yang terus menekan konsumsi rumah tangga desil bawah (Wicaksono, 2023), nilai riil dari bantuan uang tunai rawan tergerus dengan cepat sehingga daya belinya menurun drastis. Pada titik inilah Bantuan Sembako menjadi sangat krusial dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bantuan tunai semata; wujud bantuan berbasis barang (*in-kind transfer*) ini bertindak sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) yang secara absolut mengamankan ketersediaan nutrisi esensial keluarga tanpa terdistorsi oleh gejolak harga pasar. Apalagi di wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, kerentanan ekonomi rumah tangga petani masih menjadi isu dominan yang memerlukan perlindungan sosial yang stabil berupa kepastian logistik (Fitriani dan Azis, 2022). Dinamika ekonomi lokal yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga kebutuhan pokok ini menjadikan ketahanan anggaran rumah tangga berada pada titik yang rentan jika perlindungan sosialnya hanya mengandalkan likuiditas uang tunai.

Ditinjau dari perspektif akuntansi sektor publik, efektivitas bantuan-bantuan tersebut tidak lepas dari kualitas sistem pertanggungjawaban dan transparansi pelaporannya. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) digital seperti SIKS-NG menjadi instrumen vital dalam menjaga integritas data dan meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang. Peran sistem digital ini sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akurasi target sasaran bantuan sosial (Maulana dan Saputra, 2023). Akuntabilitas dalam

pencatatan keuangan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan prasyarat esensial agar anggaran negara benar-benar terserap secara efisien oleh kelompok masyarakat desil satu hingga empat. Implementasi prinsip Value for Money pada program bantuan pangan sangat menentukan apakah anggaran daerah telah digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien untuk kesejahteraan rakyat (Lestari, 2024). Tanpa penatausahaan yang transparan, bantuan sosial tidak akan mampu berfungsi optimal sebagai jaring pengaman yang akuntabel.

Sebelumnya, berbagai studi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan serupa. Jurnal penelitian oleh Fadhli & Nazila (2023) serta Anwar (2024) lebih banyak memfokuskan rumusan masalahnya pada efektivitas parsial PKH dalam menanggulangi kemiskinan melalui stabilisasi konsumsi. Sementara itu, Kusuma (2023) menyoroti efektivitas bantuan pangan non-tunai, namun terdapat tantangan berupa risiko tumpang tindih penerima bantuan di tingkat kecamatan yang dapat menghambat efisiensi program (Wahyuni, 2022). Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini mengangkat masalah mengenai sejauh mana pengaruh simultan dan koordinasi antarprogram (PKH, Sembako, dan BLT Kesra) dalam mengisi celah kebutuhan dasar untuk menciptakan ketahanan anggaran yang stabil. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan perlindungan sosial (Santoso, 2021). Analisis secara simultan menjadi penting karena integrasi program memiliki dampak yang lebih besar terhadap daya beli masyarakat dibandingkan program yang berjalan sendiri-sendiri (Nugroho, 2024). Masalah ini krusial karena tanpa koordinasi yang baik, rumah tangga akan tetap rentan terjatuh kembali ke bawah garis kemiskinan saat terjadi guncangan ekonomi eksternal atau risiko kemiskinan berulang (*chronic poverty*) (Putri & Rohman, 2023).

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan BLT Kesra terhadap ketahanan anggaran rumah tangga miskin di Kecamatan Sumbawa, baik secara parsial maupun simultan. Secara spesifik, penelitian ini menguji fungsi berbagai skema bantuan tersebut sebagai instrumen stabilitas likuiditas dan pengendalian solvabilitas domestik bagi masyarakat yang hidup di bawah Garis Kemiskinan sebesar Rp492.991 per kapita per bulan pada periode Maret 2025.

## LANDASAN TEORI

### ***Development as Freedom dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan***

Studi mengenai kemiskinan di Kecamatan Sumbawa dalam penelitian ini dianalisis melalui lensa Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999). Melalui kerangka pemikiran ini, konsep kesejahteraan tidak lagi dipandang secara reduksionis hanya berdasarkan indikator moneter atau tingkat pendapatan semata. Sebaliknya, Sen mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah fenomena perampasan kapabilitas dasar yang memicu terjadinya "ketidakbebasan" (*unfreedom*) bagi individu dalam mencapai kualitas hidup yang diinginkan (Sen, 1999). Hambatan sistemik ini mengakibatkan rumah tangga miskin kehilangan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta hak partisipasi sosial, sehingga membatasi ruang gerak mereka dalam menentukan pilihan hidup yang bermakna.

Dalam konteks ini, kebijakan bantuan sosial pemerintah ditempatkan sebagai instrumen krusial untuk mengeliminasi hambatan kapabilitas tersebut. Namun, dari perspektif akuntansi sektor publik dan tata kelola digital, transformasi wujud bantuan negara menjadi kapabilitas nyata bagi masyarakat sangat bergantung pada kualitas

akuntabilitas pengelolaan dananya. Pemenuhan "kebebasan" yang dikonsepsikan oleh Sen tidak akan terwujud secara optimal apabila terjadi misalokasi, tumpang tindih data, atau exclusion error dalam penyaluran bantuan akibat kelemahan administratif. Oleh karena itu, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terintegrasi seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menjadi prasyarat fundamental. Pengelolaan dana bansos melalui SIKS-NG berperan penting sebagai instrumen kendali manajerial yang menjamin transparansi, presisi sasaran, dan akuntabilitas distribusi bantuan langsung kepada penerima hak (Maulana & Saputra, 2023).

Dengan adanya jaminan transparansi distribusi melalui tata kelola digital ini, implementasi program seperti PKH, Bantuan Sembako, dan BLT Kesra dapat dipastikan tepat sasaran dan benar-benar berfungsi sebagai investasi nyata terhadap modal manusia (human capital) yang mampu mentransformasi struktur ekonomi rumah tangga secara gradual (Nursini, 2020). Intervensi yang dikelola secara akuntabel ini menciptakan bantalan ekonomi yang efektif mengurangi beban pengeluaran primer masyarakat. Pada akhirnya, hal ini mempertegas tesis Sen bahwa pemberdayaan kapasitas individu—yang didukung oleh infrastruktur penyaluran bantuan yang transparan dan bebas korupsi—merupakan prasyarat utama untuk memutus siklus kemiskinan secara mandiri dan menciptakan ketahanan anggaran yang berkelanjutan.

### **Ketahanan Anggaran Rumah Tangga**

Ketahanan anggaran dalam konteks penelitian ini merupakan manifestasi dari kapasitas sebuah unit rumah tangga dalam mengoordinasikan sumber daya finansialnya secara efektif guna menghadapi berbagai tekanan fiskal yang dinamis. Kemampuan ini tidak hanya sekadar mencakup pengelolaan arus kas masuk dan keluar, tetapi juga melibatkan kapabilitas strategis dalam menyusun skala prioritas utilisasi dana agar kebutuhan paling fundamental dapat terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang. Esensi dari ketahanan ini terletak pada sejauh mana rumah tangga mampu melakukan proteksi terhadap aset domestik yang mereka miliki serta keberhasilan dalam menginisiasi pembentukan dana cadangan darurat (emergency reserve funds). Keberadaan dana cadangan ini menjadi instrumen krusial yang berfungsi sebagai katup pengaman saat rumah tangga dihadapkan pada guncangan ekonomi yang tidak terduga. Lebih lanjut, urgensi dari ketahanan anggaran yang kokoh dipandang sebagai indikator fundamental dalam menilai efektivitas kebijakan publik di tingkat mikro. Sebagaimana ditegaskan oleh Sari dan Pasaribu (2024) serta Amalia dan Samputra (2019), struktur anggaran yang stabil di tingkat domestik merupakan cerminan dari keberhasilan program jaring pengaman sosial dalam mengintervensi kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi di tingkat akar rumput. Rumah tangga yang memiliki ketahanan anggaran yang baik cenderung lebih resilien terhadap fluktuasi harga komoditas maupun pergeseran garis kemiskinan, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Sumbawa. Dengan demikian, penguatan variabel ini menjadi kunci utama bagi rumah tangga miskin untuk tidak hanya bertahan secara finansial, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global maupun lokal.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk intervensi bantuan sosial tunai bersyarat yang dirancang untuk secara simultan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Dari perspektif akuntansi manajemen domestik, kehadiran PKH menjalankan fungsi krusial sebagai penjamin stabilitas pada pos biaya wajib, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan anak. Dengan adanya kepastian aliran dana dari program ini, rumah tangga memiliki perlindungan finansial yang memungkinkan pos-pos biaya esensial tersebut tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Hal ini menjadikan PKH bukan sekadar instrumen konsumtif, melainkan mekanisme proteksi anggaran yang menjaga keberlangsungan investasi modal manusia di tingkat keluarga. Dalam implementasinya, efektivitas PKH terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga sangat bergantung pada konsistensi penyaluran bantuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Jannah & Manggalou (2025), keberlanjutan bantuan PKH memberikan fleksibilitas bagi rumah tangga dalam menyusun perencanaan arus kas yang lebih terstruktur dan efektif. Kepastian dana ini membantu keluarga miskin dalam memitigasi risiko defisit pada anggaran belanja bulanan, sehingga mereka terhindar dari ketergantungan pada sumber pembiayaan luar yang berisiko memperburuk kondisi keuangan. Bagi masyarakat di Kecamatan Sumbawa, stabilitas arus kas yang didorong oleh PKH ini menjadi prasyarat penting untuk membangun manajemen keuangan domestik yang lebih disiplin dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang.

### **Program Sembako**

Program Sembako dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui penyediaan akses terhadap berbagai kebutuhan pokok. Secara operasional, bantuan ini berfungsi menciptakan efisiensi yang signifikan pada pos biaya pangan, yang merupakan komponen pengeluaran terbesar bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan terpenuhinya kebutuhan konsumsi dasar secara rutin, alokasi anggaran domestik menjadi lebih fleksibel dan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya, seperti biaya transportasi atau modal usaha skala kecil. Mekanisme ini memungkinkan rumah tangga untuk mengelola keuangan mereka dengan ruang gerak yang lebih luas, tanpa harus mengorbankan standar nutrisi keluarga. Pentingnya stabilitas bantuan ini berkaitan erat dengan kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan aset yang mereka miliki. Sebagaimana ditegaskan oleh Tuwu (2022), ketahanan persediaan (*inventory resilience*) pangan yang stabil di tingkat keluarga merupakan faktor krusial untuk mencegah rumah tangga melakukan likuidasi terhadap aset produktif saat terjadi guncangan harga pasar. Tanpa adanya jaminan ketersediaan pangan, keluarga miskin cenderung terpaksa menjual barang berharga atau alat kerja demi memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Oleh karena itu, Program Sembako di Kecamatan Sumbawa tidak hanya berperan sebagai bantuan sosial pangan, tetapi juga sebagai pelindung keberlanjutan ekonomi rumah tangga agar tetap memiliki daya tahan di tengah dinamika harga komoditas yang tidak menentu.

### **Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra Berbeda dengan mekanisme PKH yang bersifat bersyarat, BLT Kesra hadir sebagai instrumen likuiditas cepat yang dirancang secara khusus untuk responsif terhadap situasi ketidakpastian ekonomi. Bantuan ini memegang peranan krusial dalam memperkuat ketersediaan kas harian masyarakat, yang sering kali menjadi kendala utama bagi rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap. Dalam perspektif keuangan, kehadiran dana tunai ini memungkinkan keluarga miskin

untuk segera memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan secara simultan meningkatkan derajat solvabilitas mereka. Dengan adanya suntikan modal tunai ini, rumah tangga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melunasi kewajiban finansialnya tepat waktu, sehingga stabilitas keuangan domestik dapat terjaga meskipun di tengah tekanan ekonomi. Lebih lanjut, efektivitas BLT Kesra sangat bergantung pada ketepatan waktu dalam proses distribusinya ke masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sutanto & Hardiningsih (2021), penyaluran dana tunai yang dilakukan secara tepat waktu merupakan kunci bagi rumah tangga miskin untuk menjaga kedisiplinan dalam pembayaran tagihan rutin dan mencegah ketergantungan pada pinjaman informal. Akses terhadap likuiditas yang cepat ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar rumah tangga di Kecamatan Sumbawa tidak terjebak dalam jeratan utang yang lebih dalam hanya untuk menutupi kebutuhan operasional. Dengan demikian, BLT Kesra berperan sebagai pelumas bagi roda ekonomi rumah tangga, memastikan bahwa sirkulasi keuangan tetap berjalan lancar dan ketahanan anggaran tidak terdistorsi oleh beban utang yang menumpuk.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan, Desain, dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai derajat hubungan dan pengaruh antar variabel secara empiris melalui analisis statistik, sehingga dapat diperoleh generalisasi yang objektif. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan periode pengambilan data pada Maret 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada dinamika ekonomi spesifik di wilayah tersebut, yang ditandai dengan persentase penduduk miskin yang tercatat sebesar 11,79% pada Maret 2025, diiringi dengan peningkatan Garis Kemiskinan sebesar 3,18%. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Sumbawa sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis efektivitas jaring pengaman sosial. Lebih lanjut, sebagai pusat akses birokrasi penyaluran bantuan sosial di tingkat kabupaten, Kecamatan Sumbawa dipandang representatif untuk menelaah aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik.

### **Populasi dan Teknik Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sumbawa yang terdaftar secara resmi di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Berdasarkan data dari Dinas Sosial setempat, total populasi KPM berjumlah 1.276 keluarga. Untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dan meminimalisir bias, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%, melalui perhitungan:  $n = 1.276 / (1 + 1.276(0,10)^2) = 92,73$ . Angka tersebut kemudian dibulatkan menjadi tepat 96 responden guna meningkatkan reliabilitas data struktural.

Perhitungan tersebut menghasilkan ukuran sampel minimum sebesar 92,73 responden, yang kemudian dibulatkan menjadi 96 responden demi meningkatkan representasi data. Penetapan jumlah 96 responden dilandasi oleh strategi alokasi yang merata di setiap wilayah, dengan mengambil 12 responden dari masing-masing 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa. Langkah ini bertujuan untuk menjamin proporsionalitas dan akurasi gambaran kondisi ketahanan anggaran di seluruh wilayah

kecamatan. Sejalan dengan pemilihan lokasi, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa responden yang terpilih memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria utama yang ditetapkan adalah bahwa responden merupakan penerima manfaat aktif dari ketiga program bantuan sosial yang diteliti (PKH, Bantuan Sembako, dan BLT Kesra). Dengan kriteria yang ketat ini, kualitas dan relevansi informasi yang diperoleh dari responden dapat dijamin, sehingga data yang dihasilkan mampu memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak program-program tersebut terhadap ketahanan anggaran rumah tangga.

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik ini dipilih untuk memastikan responden memenuhi kriteria inklusi spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria ketat yang ditetapkan bagi 96 responden tersebut adalah: (1) Terdaftar sebagai KPM aktif, dan (2) Menerima ketiga jenis intervensi bantuan secara simultan (PKH, Bantuan Sembako, dan BLT Kesra) minimal dalam satu tahun terakhir. Guna menjamin proporsionalitas sebaran data spasial, alokasi sampel didistribusikan secara merata (quota-based purposive), yakni dengan mengambil tepat 12 responden KPM dari masing-masing 8 kelurahan/desa yang berada di lingkup administrasi Kecamatan Sumbawa.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen**

Pengumpulan data dirancang secara sistematis melalui survei lapangan (field survey) menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen utama. Kuesioner ini dirancang untuk menangkap persepsi dan kondisi faktual masyarakat secara luring. Instrumen diukur menggunakan Skala Likert empat poin (1 = Sangat Tidak Setuju, hingga 4 = Sangat Setuju). Pilihan jawaban netral sengaja dieliminasi (forced-choice scale) untuk menghindari kecenderungan responden memilih nilai tengah (central tendency bias), sehingga menghasilkan kecenderungan sikap yang lebih asertif dan dapat diukur secara presisi.

### **Sumber Data dan Triangulasi**

Selain data primer dari kuesioner, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Data sekunder bersumber dari laporan resmi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa serta publikasi indikator makroekonomi Badan Pusat Statistik (BPS). Sinergi antara kuesioner primer dan penelusuran dokumen historis ini merupakan bentuk triangulasi data (data triangulation). Pendekatan ini memastikan kredibilitas informasi, menguji konsistensi silang, dan menjamin analisis sesuai dengan standar akuntabilitas pelaporan sektor publik.

### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional disusun untuk memberikan batasan teknis pengukuran setiap konstruk variabel. Variabel independen pertama, PKH (X1), diukur melalui indikator stabilitas biaya wajib (pendidikan/kesehatan), perencanaan arus kas, dan pengurangan defisit. Variabel Bantuan Sembako (X2) diukur melalui efisiensi biaya operasional dasar, ketahanan persediaan pangan, dan fleksibilitas anggaran. Variabel BLT Kesra (X3) diukur melalui indikator kecepatan likuiditas harian, perbaikan solvabilitas jangka pendek, dan ketepatan waktu pembayaran tagihan utilitas.

Sementara itu, variabel dependen utama, yaitu Ketahanan Anggaran Rumah Tangga (Y), dikonseptualisasikan dan diukur menggunakan pendekatan manajemen keuangan domestik yang bertumpu pada dua proksi utama: rasio pengeluaran (expense ratio) dan likuiditas aset (asset liquidity).

1. Berdasarkan dimensi Rasio Pengeluaran, ketahanan diukur dari kemampuan rumah tangga menekan proporsi pengeluaran konsumsi primer terhadap total arus kas masuk (termasuk dana bansos). Indikator ini menilai sejauh mana rumah tangga mampu menjaga efisiensi agar tidak terjadi defisit (pengeluaran melampaui total penerimaan).
2. Berdasarkan dimensi Likuiditas Aset, ketahanan diukur dari kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan aset fisik atau aset produktifnya (seperti ternak, alat pertanian, atau perhiasan) dari risiko likuidasi paksa (forced liquidation). Indikator ini menilai sejauh mana ketersediaan kas harian dan dana cadangan darurat mampu menutupi guncangan ekonomi seketika, tanpa mengharuskan KPM menjual aset berharga mereka sebagai sumber likuiditas akhir.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural berbasis variance atau Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada fleksibilitasnya yang tidak mensyaratkan asumsi normalitas data multivariat secara ketat dan efisiensinya dalam mengolah jumlah sampel ukuran menengah (96 responden) tanpa mengurangi kekuatan prediktif (statistical power). Analisis dilakukan melalui dua evaluasi utama: evaluasi outer model (menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit instrumen) serta evaluasi inner model (menguji koefisien determinasi  $R^2$ , Effect Size  $f^2$ , relevansi prediktif  $Q^2$ , dan signifikansi koefisien jalur melalui metode bootstrapping untuk menjawab hipotesis).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

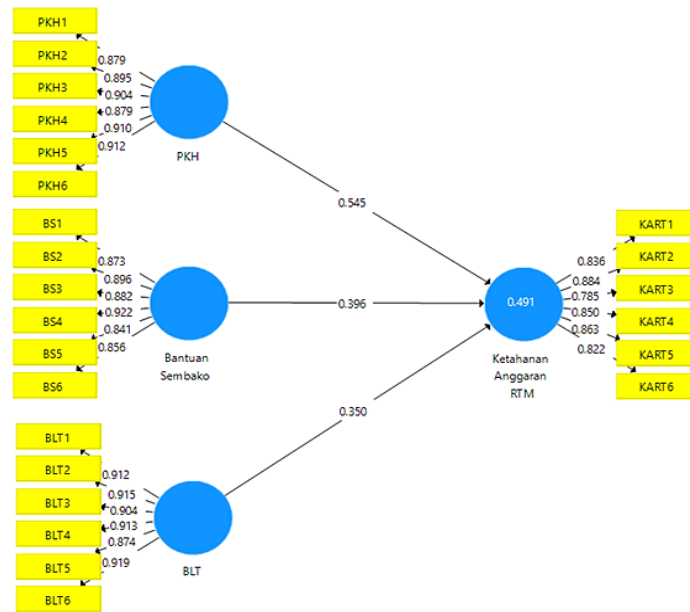
### **Hasil**

#### **Uji Outer Model**

Tahap awal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian adalah evaluasi outer model. Langkah ini berfungsi untuk memvalidasi apakah butir-butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu merepresentasikan variabel laten yang diteliti secara akurat dan konsisten.

1. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen diukur untuk melihat sejauh mana indikator-indikator dalam satu variabel saling berkaitan atau mengumpul pada konstruksinya (Sari & Pasaribu, 2024).



**Gambar 1. Outer Model Variabel PKH, Bantuan Sembako, BLT Kesra, dan Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin**

Pada Gambar 1 di atas, menggambarkan model spesifikasi hubungan antar variabel yang dilengkapi dengan indikator pada masing-masing variabel serta nilai outer loading yang dihasilkan. Berikut disajikan nilai outer loading dari setiap indikator pada variabel penelitian. Berdasarkan hasil kalkulasi algoritma, seluruh indikator yang mewakili variabel Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, BLT Kesra, dan Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin menunjukkan nilai outer loading di atas 0,70. Temuan ini menegaskan bahwa tidak ada indikator yang harus dieliminasi dari model, karena semuanya memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan variabelnya masing-masing.

**Tabel 1. Nilai Outer Loading**

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
PKH (X1)	PKH1	<b>0.879</b>	Valid
	PKH2	<b>0.895</b>	Valid
	PKH3	<b>0.904</b>	Valid
	PKH4	<b>0.879</b>	Valid
	PKH5	<b>0.910</b>	Valid
	PKH6	<b>0.912</b>	Valid
Bantuan Sembako (X2)	BS1	<b>0.873</b>	Valid
	BS2	<b>0.896</b>	Valid
	BS3	<b>0.882</b>	Valid
	BS4	<b>0.922</b>	Valid
	BS5	<b>0.841</b>	Valid
	BS6	<b>0.856</b>	Valid
BLT Kesra (X3)	BLT1	<b>0.912</b>	Valid
	BLT2	<b>0.915</b>	Valid
	BLT3	<b>0.904</b>	Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin (Y)	BLT4	<b>0.913</b>	Valid
	BLT5	<b>0.874</b>	Valid
	BLT6	<b>0.919</b>	Valid
	KART1	<b>0.836</b>	Valid
	KART2	<b>0.884</b>	Valid
	KART3	<b>0.785</b>	Valid
	KART4	<b>0.850</b>	Valid
	KART5	<b>0.863</b>	Valid
	KART6	<b>0.822</b>	Valid

Sumber: data diolah, 2026

Merujuk pada hasil kalkulasi algoritma SmartPLS yang terangkum dalam Tabel 1, terlihat bahwa seluruh indikator yang merefleksikan variabel Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, BLT Kesra, dan Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin menunjukkan performa yang sangat impresif. Secara terperinci, setiap item pernyataan dalam instrumen penelitian ini berhasil mencatatkan nilai outer loading yang melampaui standar minimal 0,70. Pencapaian ini menegaskan bahwa setiap indikator memiliki korelasi yang sangat kuat dan relevan dalam menjelaskan konstruk variabel latennya masing-masing.

## 2. Uji Validitas Diskriminan

Uji Validitas Diskriminan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki identitas yang benar-benar unik dan berbeda secara empiris dibandingkan dengan konstruk lainnya (Jannah & Mangalou, 2025).

**Tabel 2. Hasil Cross Loading**

Indikator	X1	X2	X3	Y
PKH1	<b>0.879</b>	-0.146	-0.150	0.386
PKH2	<b>0.895</b>	-0.038	-0.133	0.427
PKH3	<b>0.904</b>	-0.105	-0.188	0.394
PKH4	<b>0.879</b>	-0.001	-0.081	0.453
PKH5	<b>0.910</b>	-0.036	-0.168	0.396
PKH6	<b>0.912</b>	-0.127	-0.087	0.412
BS1	0.036	<b>0.873</b>	-0.075	0.315
BS2	-0.085	<b>0.896</b>	0.078	0.356
BS3	-0.084	<b>0.882</b>	0.055	0.361
BS4	-0.065	<b>0.922</b>	0.061	0.361
BS5	-0.131	<b>0.841</b>	-0.008	0.222
BS6	-0.141	<b>0.856</b>	-0.015	0.218
BLT1	-0.131	0.074	<b>0.912</b>	0.292
BLT2	-0.129	0.029	<b>0.915</b>	0.249
BLT3	-0.193	-0.054	<b>0.904</b>	0.219
BLT4	-0.154	-0.028	<b>0.913</b>	0.202
BLT5	-0.182	-0.015	<b>0.874</b>	0.179
BLT6	-0.063	0.078	<b>0.919</b>	0.322
KART1	0.292	0.375	0.228	<b>0.836</b>

Indikator	X1	X2	X3	Y
KART2	0.448	0.312	0.309	<b>0.884</b>
KART3	0.457	0.211	0.153	<b>0.785</b>
KART4	0.374	0.298	0.173	<b>0.850</b>
KART5	0.377	0.314	0.238	<b>0.863</b>
KART6	0.365	0.306	0.288	<b>0.822</b>

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Tabel 2 di atas, mengenai nilai cross loading, terlihat secara empiris bahwa setiap indikator dalam variabel penelitian memiliki korelasi yang lebih kuat terhadap konstruk asalnya dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain. Fenomena ini menunjukkan adanya diferensiasi yang jelas antarvariabel, di mana setiap butir instrumen mampu merepresentasikan variabel latennya secara spesifik tanpa mengalami tumpang tindih dengan variabel independen maupun dependen lainnya.

### 3. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan sebagai tolok ukur keandalan adalah Composite Reliability. Sebuah variabel laten dapat dikategorikan memiliki reliabilitas yang memadai apabila nilai Composite Reliability yang dihasilkan berada di atas ambang batas 0,70 (Sari & Pasaribu, 2024).

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability
PKH (X1)	0.951	0.961
Bantuan Sembako (X2)	0.942	0.953
BLT Kesra (X3)	0.957	0.965
Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin (Y)	0.917	0.935

Sumber: data diolah, 2026

Merujuk pada data penelitian yang terangkum dalam Tabel 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh indikator konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai Composite Reliability maupun Cronbach's Alpha yang secara konsisten berada di atas ambang batas 0,70. Pencapaian angka tersebut memberikan indikasi kuat bahwa seluruh variabel dalam model penelitian ini memiliki internal consistency reliability yang solid.

### Uji Inner Model

Setelah seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel pada pengujian outer model, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kekuatan prediksi dari model penelitian serta untuk mengetahui hubungan antarvariabel laten sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan.

#### 1. Multikolineralitas (VIF)

Dalam penelitian ini, deteksi multikolineralitas dilakukan dengan meninjau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Sebuah model prediktif dinyatakan sehat dan bebas dari masalah multikolineralitas apabila nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 5,00 (Hair dkk., 2021).

**Tabel 4. Hasil Analisis VIF**

Variabel	VIF
PKH (X1)	1.029
Bantuan Sembako (X2)	1.007
BLT Kesra (X3)	1.023

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan hasil kalkulasi menggunakan perangkat lunak SmartPLS yang disajikan pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel PKH (X1) adalah sebesar 1,029, Bantuan Sembako (X2) sebesar 1,007, dan BLT Kesra (X3) sebesar 1,023. Secara signifikan, seluruh nilai VIF yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen tersebut berada jauh di bawah ambang batas 5,00. Rendahnya nilai VIF ini memberikan penegasan secara empiris bahwa tidak terdapat korelasi yang berlebihan antarvariabel independen dalam model ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga estimasi koefisien jalur yang dihasilkan bersifat stabil dan tidak bias.

2. Uji kekuatan Model ( $R^2$ ,  $F^2$  dan  $Q^2$ )
  - a. Koefisien Determinasi (R-Square)

**Tabel 5. Hasil Uji  $R^2$** 

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Ketahanan Anggaran RTM	0.491	0.475

Sumber data: diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis data yang terangkum dalam Tabel 6, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,491 pada konstruk Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin (Y). Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari variabel Program Keluarga Harapan X<sub>1</sub>, Bantuan Sembako X<sub>2</sub>, dan BLT Kesra X<sub>3</sub> secara simultan mampu menjelaskan variasi ketahanan anggaran masyarakat miskin di Kecamatan Sumbawa sebesar 49,1%. Sementara itu, sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan model penelitian ini, seperti tingkat pendapatan tambahan, literasi keuangan, atau dukungan modal usaha mikro.

- b. Uji *Effect Size* ( $F^2$ )

**Tabel 6. Hasil Uji  $F^2$** 

Variabel	$F^2$
X1 -> Y	0.567
X2 -> Y	0.306
X3 -> Y	0.236

Sumber data: diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis *effect size* ( $F^2$ ), ditemukan bahwa variabel Program Keluarga Harapan (X<sub>1</sub>) memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketahanan anggaran rumah tangga di Kecamatan Sumbawa, dengan nilai  $f^2$  sebesar 0,567 yang termasuk dalam kategori besar (*large effect*), mengukuhkan peran dominan bantuan tunai bersyarat sebagai faktor paling determinan dalam memperkuat stabilitas finansial masyarakat prasejahtera sebagaimana ditegaskan oleh Sari & Pasaribu (2024). Sementara itu, variabel Bantuan Sembako (X<sub>2</sub>) dan BLT Kesra (X<sub>3</sub>) masing-masing mencatatkan nilai  $f^2$  sebesar 0,306 dan 0,236 yang

berada pada kategori pengaruh moderat (medium effect), mengindikasikan bahwa meskipun kontribusinya tidak sebesar PKH, kedua instrumen bantuan tersebut tetap berperan krusial sebagai pilar pendukung dalam memperkuat fondasi anggaran keluarga miskin. Temuan ini secara empiris memperkuat argumentasi bahwa diversifikasi skema perlindungan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Jannah & Manggalou (2025) dan Hair dkk. (2021), merupakan strategi efektif dalam membangun resiliensi ekonomi yang berkelanjutan bagi kelompok rentan melalui kombinasi intervensi tunai bersyarat, bantuan pangan, dan dukungan likuiditas jangka pendek.

c. Uji *Q-Square* ( $Q^2$ )

Pengujian *Q-Square* ( $Q^2$ ) digunakan untuk mengetahui kemampuan prediktif dari model penelitian. Model dikatakan memiliki kemampuan prediktif apabila nilai  $Q^2 > 0$  (Hair dkk., 2021).

**Tabel 7. Hasil Uji  $Q^2$**

Variabel	SSO	SSE	$Q^2$
Ketahanan Anggaran Rumah Tangg Miskin	576.000	385.186	0.331

Sumber data: diolah, 2026

Nilai *cross-validated redundancy* ( $Q^2$ ) sebesar 0,331 yang diperoleh dari analisis *blindfolding* menunjukkan bahwa model penelitian memiliki relevansi prediktif yang sangat baik, jauh melampaui ambang batas minimal nol. Temuan ini mengonfirmasi bahwa variabel Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra secara akurat mampu memprediksi variasi pada Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Sumbawa. Capaian  $Q^2$  yang berada pada kategori menengah hingga kuat tersebut tidak hanya membuktikan soliditas model secara teoretis, tetapi juga menegaskan aplikabilitasnya sebagai instrumen evaluasi kebijakan perlindungan sosial yang andal di lapangan.

### Pengujian Hipotesis (Bootstrapping)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Dalam standar pengujian dua arah (two-tailed test) dengan tingkat kepercayaan 95%, sebuah hipotesis dinyatakan terdukung atau diterima apabila mencatatkan nilai T-statistic  $> 1,96$  dan nilai P-value  $< 0,05$  (Hair dkk., 2021).

**Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel Konstruk	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Value
X1 -> Y	0.545	7.365	0.000
X2 -> Y	0.396	5.864	0.000
X3 -> Y	0.350	5.336	0.000

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis model struktural menggunakan metode bootstrapping yang terangkum dalam Tabel 8, peneliti dapat melakukan interpretasi terhadap hubungan antarvariabel sebagai berikut:

- Pengaruh Program Keluarga Harapan  $\{(X)_1$  terhadap Ketahanan Anggaran (Y) Berdasarkan hasil olah data, variabel  $X_1$  mencatatkan nilai koefisien jalur (Original Sample) sebesar 0,545 dengan nilai T-statistic sebesar 7,365 dan P-value 0,000. Karena

- nilai T-statistic melampaui ambang batas 1,96 dan P-value jauh di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X<sub>1</sub> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin (Y). Hal ini membuktikan bahwa dukungan tunai melalui PKH secara nyata menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas finansial keluarga prasejahtera di Kecamatan Sumbawa. Temuan ini selaras dengan studi Sari & Pasaribu (2024) yang menyatakan bahwa bantuan tunai bersyarat efektif dalam memitigasi guncangan ekonomi domestik
- b. Pengaruh Bantuan Sembako (X<sub>2</sub>) terhadap Ketahanan Anggaran (Y) Pengujian pada variabel X<sub>2</sub> menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,396 dengan dukungan nilai T-statistic sebesar 5,864 dan P-value 0,000. Hasil ini memberikan konfirmasi bahwa X<sub>2</sub> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin (Y). Peran bantuan pangan ini sangat krusial dalam mereduksi beban pengeluaran konsumsi pokok, sehingga rumah tangga memiliki ruang finansial yang lebih baik untuk kebutuhan lainnya. Hasil penelitian ini didukung oleh Jannah & Manggalou (2025) yang mengemukakan bahwa bantuan sosial non-tunai secara konsisten meningkatkan resiliensi anggaran masyarakat miskin.
  - c. Pengaruh BLT Kesra (X<sub>3</sub>) terhadap Ketahanan Anggaran (Y) Untuk variabel X<sub>3</sub>, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,350 dengan nilai T-statistic 5,336 dan P-value 0,000. Mengingat kriteria signifikansi terpenuhi, maka dinyatakan bahwa X<sub>3</sub> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin (Y). Sebagai instrumen bantuan kebijakan lokal, BLT Kesra terbukti efektif menjadi pelengkap jaring pengaman sosial dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di lokasi penelitian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama & Wijaya (2023) yang menekankan pentingnya bantuan tunai lokal dalam menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan hasil analisis struktural dan kuesioner, Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti menjadi faktor paling dominan (dengan ukuran efek terbesar) dalam menopang ketahanan anggaran rumah tangga di Kecamatan Sumbawa. Kondisi demografis di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas penerima manfaat adalah kepala keluarga berusia lanjut (di atas 55 tahun) yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang berfluktuasi dan beban tanggungan keluarga yang tinggi. Dalam situasi kerentanan ini, PKH bertindak sebagai instrumen penyuntik likuiditas utama yang menjamin pos-pos pengeluaran wajib, seperti biaya pendidikan dan kesehatan anak, tetap terdani tanpa mengorbankan alokasi untuk kebutuhan domestik lainnya.

Kondisi lapangan ini sangat selaras dengan Capability Approach (Pendekatan Kapabilitas) dari Amartya Sen (1999) yang memandang bantuan sosial sebagai upaya untuk menghilangkan "ketidakbebasan" ekonomi. Melalui perspektif akuntansi manajemen domestik, aliran dana PKH yang terstruktur memberikan kepastian arus kas (cash flow certainty) bagi keluarga miskin. Kepastian dana ini mengeliminasi risiko defisit anggaran yang ekstrem, sehingga rumah tangga dapat mengalihkan fokus mereka dari sekadar bertahan hidup menjadi investasi pada modal manusia (human capital) yang krusial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Temuan mengenai efektivitas dominan PKH ini didukung kuat oleh penelitian Sari dan Pasaribu (2024) yang menyatakan bahwa skema bantuan tunai bersyarat memiliki efikasi tertinggi karena memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat untuk memitigasi guncangan ekonomi domestik. Selain itu, studi dari Jannah dan Manggalou (2025) menegaskan bahwa keberlanjutan penyaluran PKH secara langsung memberikan ruang bagi rumah tangga prasejahtera untuk melakukan perencanaan arus kas yang lebih terstruktur dan disiplin, mencegah mereka dari ketergantungan pada sumber pembiayaan luar yang berisiko.

Secara naratif, ketahanan anggaran rumah tangga prasejahtera di Kecamatan Sumbawa sangat bergantung pada "jangkar likuiditas" yang ditawarkan oleh PKH. Keluarga yang menerima bantuan ini secara rutin terbukti memiliki tingkat resiliensi yang jauh lebih tinggi dalam menghadapi tekanan garis kemiskinan yang terus meningkat (mencapai Rp492.991 per kapita). PKH tidak sekadar berfungsi sebagai dana konsumtif, melainkan bertransformasi menjadi pelindung fiskal keluarga yang mencegah mereka jatuh ke dalam jurang utang yang eksploitatif demi memenuhi hak-hak dasar anggota keluarganya.

## **2. Pengaruh Bantuan Sembako terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin**

Bantuan Sembako menunjukkan kontribusi yang sangat vital dalam menciptakan efisiensi pengeluaran dasar bagi rumah tangga miskin di Kecamatan Sumbawa. Dari profil responden yang rata-rata berpendapatan di bawah 2 juta rupiah dengan jumlah anggota keluarga 3 hingga 7 orang, biaya konsumsi pangan merupakan komponen yang paling menguras anggaran bulanan. Dengan adanya Bantuan Sembako, beban pengeluaran pangan pokok berkurang secara signifikan. Subsidi pangan ini secara langsung menciptakan fleksibilitas anggaran, di mana dana yang sebelumnya harus dialokasikan untuk membeli beras atau kebutuhan gizi lainnya kini dapat disimpan sebagai dana cadangan darurat.

Diferensiasi perlindungan melalui wujud barang (in-kind transfer) ini sangat mendukung konsep likuiditas aset (asset liquidity) dan ketahanan persediaan (inventory resilience) dalam manajemen keuangan rumah tangga. Secara empiris di wilayah agraris seperti Sumbawa, ketika terjadi guncangan ekonomi eksternal—seperti gagal panen, anjloknya harga komoditas pertanian lokal, atau lonjakan inflasi mendadak—pemenuhan kebutuhan fisiologis (pangan) menjadi prioritas absolut yang tidak dapat ditunda. Tanpa adanya jaminan logistik dari negara, rumah tangga miskin yang kelimpungan akibat ketiadaan kas harian akan terdorong melakukan "likuidasi paksa" (forced liquidation) terhadap aset-aset berharga mereka. Praktik destruktif yang umum terjadi adalah terpaksa menjual KPM menjual hewan ternak (seperti sapi, kambing, atau ayam), menggadaikan perhiasan, hingga melepas alat kerja produktif (seperti traktor tangan, cangkul, atau mesin pompa air) dengan harga jauh di bawah nilai wajar (distress sale) semata-mata demi membeli beras. Likuidasi aset produktif ini merupakan jebakan kemiskinan (poverty trap) yang paling fatal karena secara langsung menghancurkan basis modal (capital base) utama masyarakat untuk menghasilkan pendapatan di masa depan.

Hadirnya Bantuan Sembako secara efektif mengintervensi kepanikan finansial tersebut. Bantuan ini bertindak sebagai "bantalan logistik" yang menyerap dampak guncangan ekonomi secara seketika. Karena ketersediaan nutrisi esensial keluarga telah diamankan tanpa bergantung pada fluktuasi harga pasar, rumah tangga prasejahtera di Sumbawa memiliki daya tahan lebih panjang dan tidak perlu mengorbankan aset produktif maupun hewan ternak mereka untuk bertahan hidup. Dukungan empiris terhadap fungsi

protektif Bantuan Sembako ini sejalan dengan penelitian Tuwu (2022) yang menekankan bahwa ketahanan persediaan pangan di tingkat keluarga sangat esensial untuk mencegah rumah tangga melakukan likuidasi aset saat terjadi krisis harga pasar. Lebih lanjut, temuan ini memperkuat kesimpulan Jannah dan Manggalou (2025) yang memaparkan bahwa penyediaan bantuan pangan non-tunai secara konsisten efektif menjaga stabilitas daya beli masyarakat rentan di tingkat akar rumput.

Kondisi di lapangan secara nyata membuktikan bahwa kinerja anggaran keluarga prasejahtera di Kecamatan Sumbawa menjadi jauh lebih tangguh berkat jaminan Sembako. KPM tidak lagi dihadapkan pada pilihan dilematis antara membiarkan keluarga kelaparan atau menjual alat-alat produksi andalan mereka. Konsistensi bantuan ini memastikan standar gizi keluarga tetap terjaga, sekaligus membangun benteng ekonomi jangka panjang agar harta benda skala mikro yang menjadi sumber mata pencaharian mereka tetap utuh meskipun terjadi turbulensi ekonomi eksternal.

### **3. Pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra memegang peranan yang sangat spesifik sebagai instrumen likuiditas cepat yang responsif bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sumbawa. Berdasarkan data lapangan, banyak responden yang bekerja sebagai buruh harian, petani, atau pedagang kecil sering mengalami ketidakpastian kas harian (daily cash flow mismatch). BLT Kesra hadir menutupi celah (gap) likuiditas tersebut. Dana tunai yang sifatnya tanpa syarat ini banyak dialokasikan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan mendesak, seperti membayar tagihan utilitas (listrik/air), biaya transportasi, atau tambahan modal harian yang tidak terkover oleh PKH maupun Bantuan Sembako.

Secara teoretis, pengaruh BLT Kesra ini sangat merepresentasikan konsep solvabilitas dan likuiditas operasional dalam manajemen keuangan. Kehadiran suntikan dana cepat ini berfungsi sebagai pelumas sirkulasi ekonomi domestik. Dengan tersedianya kas operasional (quick cash), rumah tangga memiliki rasio kemampuan bayar yang lebih sehat terhadap kewajiban rutinnnya. Hal ini mencegah terjadinya snowball effect dari denda keterlambatan pembayaran atau keterikatan pada pinjaman informal (rentenir) yang berbunga tinggi, yang sering menjadi sumber kebangkrutan ekonomi di tingkat akar rumput.

Temuan mengenai efektivitas likuiditas BLT Kesra ini didukung erat oleh studi Sutanto dan Hardiningsih (2021) yang menyatakan bahwa penyaluran dana tunai yang tepat waktu adalah kunci bagi rumah tangga miskin untuk menjaga kedisiplinan pembayaran tagihan dan mencegah jeratan utang. Hal ini juga beresonansi dengan penelitian Pratama dan Wijaya (2023) yang mengungkapkan bahwa intervensi bantuan tunai yang bersumber dari kebijakan lokal sangat signifikan dampaknya dalam jangka pendek, bertindak sebagai suplemen pendapatan krusial bagi kelompok rentan di tengah ketidakpastian makroekonomi.

Secara keseluruhan, arsitektur ketahanan anggaran di Kecamatan Sumbawa menjadi utuh dengan kehadiran BLT Kesra sebagai lapis pelindung terakhir. Jika PKH berfokus pada investasi manusia dan Sembako pada ketahanan logistik (dan perlindungan aset), maka BLT Kesra adalah "dana taktis" yang menyelamatkan keluarga dari tekanan kas harian. Sinergi ini memastikan bahwa sirkulasi keuangan harian keluarga tetap berjalan lancar, menjaga martabat dan stabilitas finansial mereka dari hari ke hari di tengah himpitan struktural yang ada.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin. Di antara ketiga variabel bantuan yang diuji, PKH menunjukkan pengaruh yang paling kuat dan dominan dalam menopang stabilitas finansial keluarga prasejahtera. Temuan ini membuktikan bahwa dukungan tunai bersyarat ini berfungsi sebagai penyokong likuiditas utama yang memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat untuk mengalokasikan dana secara mandiri guna memenuhi pos biaya wajib (seperti pendidikan dan kesehatan), sehingga sangat efektif dalam memitigasi guncangan ekonomi domestik.
2. Bantuan Sembako memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin. Peran intervensi pangan non-tunai ini terbukti sangat krusial dalam mereduksi beban pengeluaran konsumsi pokok masyarakat. Dengan terjaminnya ketersediaan nutrisi dasar, rumah tangga memiliki ruang finansial (fleksibilitas anggaran) yang lebih baik untuk dialihkan pada kebutuhan mendesak lainnya, sekaligus bertindak sebagai pelindung agar keluarga tidak terpaksa melikuidasi aset esensial saat terjadi fluktuasi harga pasar.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketahanan Anggaran Rumah Tangga Miskin. Sebagai instrumen kebijakan lokal, BLT Kesra terbukti efektif menjadi pelengkap jaring pengaman sosial yang menyediakan kas cepat (quick cash) untuk operasional harian. Suntikan dana tunai ini berperan penting dalam menjaga tingkat solvabilitas rumah tangga, memastikan mereka mampu memenuhi kewajiban belanja primer tepat waktu, dan mencegah masuknya keluarga miskin ke dalam siklus utang yang eksploitatif.

## Saran dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan empiris mengenai krusialnya peran PKH, Bantuan Sembako, dan BLT Kesra terhadap ketahanan anggaran rumah tangga miskin, penelitian ini mengajukan beberapa saran taktis dan implikasi kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Data Digital (SIKS-NG) secara Real-Time Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial perlu melakukan sinkronisasi data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kecamatan dan desa secara real-time. Hal ini sangat krusial untuk memitigasi risiko salah sasaran (exclusion dan inclusion error), khususnya pada penyaluran BLT Kesra yang menuntut kecepatan likuiditas saat terjadi guncangan ekonomi. Integrasi data kemiskinan dengan sistem administrasi kependudukan daerah akan memastikan akuntabilitas penyaluran dana publik dan mencegah tumpang tindih (overlapping) penerima manfaat antarprogram.
2. Pendampingan Literasi Keuangan Domestik terintegrasi Mengingat PKH dan BLT Kesra memberikan suntikan likuiditas tunai, efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada perilaku manajerial keluarga. Oleh karena itu, penyaluran bantuan tunai harus dibarengi dengan program pendampingan literasi keuangan dan akuntansi rumah tangga sederhana. Edukasi ini bertujuan agar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mampu membedakan kebutuhan konsumtif dan produktif, serta mendisiplinkan mereka untuk mengalokasikan "ruang fiskal" yang tercipta dari Bantuan Sembako menjadi dana cadangan darurat (emergency fund) alih-alih dihabiskan untuk konsumsi sekunder.

3. Penguatan Rantai Pasok Lokal pada Program Sembako Untuk memaksimalkan multiplier effect (efek pengganda) dari Bantuan Sembako, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat ekosistem e-Warong dengan mengintegrasikannya secara langsung pada rantai pasok petani dan peternak lokal di Sumbawa. Kebijakan ini tidak hanya mengamankan ketersediaan nutrisi dan mencegah likuidasi aset bagi KPM, tetapi secara makro juga akan menyerap hasil panen petani lokal, sehingga perputaran uang negara tetap berada di dalam ekosistem ekonomi tingkat kabupaten.
4. Desain Strategi Wisuda (Exit Strategy) berbasis Kewirausahaan Bantuan sosial pada dasarnya adalah jaring pengaman sementara, bukan pendapatan tetap. Oleh karena itu, diperlukan sinergi tingkat lanjut antara penerima bansos yang telah memiliki ketahanan anggaran stabil dengan program pemberdayaan UMKM atau pembiayaan ultra-mikro. KPM yang telah berhasil mencegah defisit kas bulanan (berkat PKH) dan tidak lagi berisiko menjual asetnya (berkat Sembako), harus secara bertahap difasilitasi dengan pelatihan kewirausahaan digital dan akses modal kerja yang terjangkau agar dapat "lulus" (graduasi) dari status penerima bantuan menjadi rumah tangga mandiri secara ekonomi.

## DAFTAR REFERENSI

1. Amalia, L., & Samputra, P. L. (2019). *Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Bansos*. <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1792/1441>
2. Anwar. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Sosial Ekonomi*.
3. BPS Kabupaten Sumbawa. (2025). *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2025 / Berita Resmi Statistik Maret 2025*.
4. Fadhli, M., & Nazila, R. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Beban Pengeluaran Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 88–102. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pembangunan/article/view/52144>
5. Fauzi, & others. (2021). Perlindungan Aset Rumah Tangga melalui Jaring Pengaman Sosial. *Jurnal Manajemen Risiko*.
6. Fitriani, E., & Azis, M. (2022). Kerentanan Ekonomi Rumah Tangga Petani di Wilayah NTB. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*. <https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP>
7. Handayani. (2022). Likuiditas Rumah Tangga dan Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Riset Akuntansi (JRAK)*, 14(1).
8. Hidayat, Nurhayati, & others. (2021). Stabilitas Biaya Wajib dalam Program Keluarga Harapan. *Jurnal Akuntansi Publik*.
9. Hidayat, R., & Setiawan, B. (2023). Sinergi PKH dan BPNT dalam Penurunan Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Sosial Terapan*. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jst/article/view/1234>
10. Jannah, & Manggalou. (2025). Keberlanjutan PKH untuk Perencanaan Arus Kas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
11. Kusuma, W. (2023). Efektivitas Bantuan Pangan Non-Tunai dalam Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Gizi Dan Kebijakan*. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan>
12. Lestari, S. (2024). Implementasi Value for Money pada Program Sembako di Tingkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi>

13. Lestari, S., & others. (2023). Perencanaan Arus Kas (Cash Flow) dalam Pengelolaan Bantuan Tunai. *Economics Development Analysis Journal*, 12(3). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/54321>
14. Maulana, A., & Saputra, R. (2023). Efektivitas Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 134–148. <https://doi.org/10.32424/jeba.v10i2>
15. Maulana, H., & Saputra, R. (2023). Peran SIKS-NG dalam Transparansi Penyaluran Bansos. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jusibi>
16. Mulyani. (2019). Ketahanan Persediaan Pangan di Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Logistik*.
17. Nugroho, A. (2024). Analisis Simultan Program Bansos terhadap Daya Beli Masyarakat. *Journal of Economics and Business*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jejak>
18. Nursini, N. (2020). Micro-impact of social assistance programs on household welfare: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00223-z>
19. Pratama, A. (2022). Literasi Keuangan dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.14203/jep.v30i1.612>
20. Pratama, R., & Wijaya, A. (2021). Efisiensi Biaya Operasional Rumah Tangga melalui Bantuan Sembako. *Jurnal Unismuh*, 9(1). <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/unismuh/article/view/1234>
21. Putri, A., & Rohman, A. (2023). Guncangan Ekonomi dan Risiko Kemiskinan Berulang (Chronic Poverty). *Jurnal Riset Ekonomi*. <https://journal.uui.ac.id/jeres>
22. Ramadani, L. (2022). Pengurangan Defisit Anggaran melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pembangunan/article/view/52144>
23. Ramadhan, F. (2024). Analisis Dampak Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/>
24. Risyanti. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Dana Publik di Tingkat Kabupaten. *Jurnal Akuntansi Auditama*, 4(1). <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/2100>
25. Santoso, I. (2021). Koordinasi Program Perlindungan Sosial antara Pusat dan Daerah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*. <https://journal.bappenas.go.id/>
26. Saputra, A., & Ariska, D. (2023). Kemampuan Pelunasan Utang Rumah Tangga Prasejahtera melalui Intervensi BLT. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 20(2). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/3210>
27. Sari, D. P., & others. (2021). Dampak Bansos Tunai terhadap Konsumsi Rumah Tangga Selama Pandemi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i2.231>
28. Sari, N., & Pasaribu, R. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi Domestik. *Journal of Global Social Policy*, 2(1). <https://greenationpublisher.org/JGSP/article/view/135>
29. Satriawan, E. (2018). *Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia*. <https://www.tnp2k.go.id/id/artikel/evaluasi-dampak-program-keluarga-harapan-pkh-di-indonesia>

30. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press. <https://www.goodreads.com/work/quotes/168039-development-as-freedom>
31. Sen, A. (2002). *Pembangunan sebagai Kebebasan*. Pustaka Pelajar.
32. Sutanto, & Hardiningsih. (2021). Ketepatan Waktu Pembayaran Tagihan dan Ketahanan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
33. Tuwu, D. (2022). Ketahanan Persediaan Pangan Keluarga untuk Mencegah Likuidasi Aset. *Jurnal Sosialisasi*, 9(1).
34. Utami, M. (2022). Evaluasi Kebijakan BLT dalam Menjaga Solvabilitas Rumah Tangga Desil Bawah. *Jurnal Keuangan Publik*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JKP>
35. Wahyuni, T. (2022). Analisis Tumpang Tindih Penerima Bansos di Tingkat Kecamatan. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://journal.unair.ac.id/JAP>
36. Wicaksono, G. (2023). Inflasi Pangan dan Garis Kemiskinan: Studi Kasus Indonesia. *Journal of Applied Economics*. <https://journal.ugm.ac.id/gamaijb>
37. Wulandari, & Setiawan. (2024). Fleksibilitas Anggaran Rumah Tangga pada Penerima Program Sembako. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 3(2), 204-218.